

**PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PEMERINTAH****NAGARI DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN****LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH****KABUPATEN LIMA PULUH KOTA****NOMOR 1 TAHUN 2018****SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :**VILIA LAMDESTA****11720724863****HUKUM TATA NEGARA****JURUSAN ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1442 H / 2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Fungsi Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dalam Pengawasan Pemerintah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018”***, yang ditulis oleh:

Nama : VILIA LAMDESTA

NIM : 11720724863

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2021
Pembimbing Skripsi

Asril, SH., MH.
NIP. 197604202009011008

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PEMERINTAH NAGARI DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018"* yang ditulis oleh :

Nama : **VILIA LAMDESTA**

NIM : 11720724863

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua

Firdaus, SH., M.H

Sekretaris

Ilham Akbar, SH., M.H

Penguji I

Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II

Lysa Angrayni, SH., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

ABSTRAK

Vilia Lamdesta (2021) : Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pemerintah Nagari di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, dan apa kendala dalam melaksanakan pengawasan yang dihadapi oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian *Hukum sosiologis* yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu, Ketua Bamus, Wali Nagari Taeh Bukik, dan tokoh masyarakat Nagari Taeh Bukik. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku sebagai pelengkap bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan analisa *kualitatif*.

Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pemerintah Nagari di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan sesuai ketentuan yang dibuat secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi oleh anggota BAMUS dan Pemerintahan Nagari. Kendala yang dihadapi oleh BAMUS Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu, Masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BAMUS Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Ketua BAMUS dengan anggotanya, dimana hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt, kerana berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Rusli M.Z. dan Ibuknda tercinta Pepi Awismar serta nenek terkasih Harnis, adek Vilio Lamdesta dan seluruh keluarga penulis yang menjadi sumber motivasi bagi penulis dan senantiasa mendoakan agar penulis selalu bersemangat dalam menuntut ilmu.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, beserta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., dan Wakil Rektor III Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph.D., yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M. Ag yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.

4. Bapak Firdaus, SH. MH selaku Ketua jurusan Ilmu Hukum serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

5. Bapak Asril, SH. MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran kepada penulis dalam penelitian ini.

6. Bapak/Ibuk Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberi semangat serta ilmu tiada henti kepada penulis selama mengerjakan skripsi.

7. Bapak Ilham Akbar, SH. MH selaku penasehat akademik yang senantiasa membimbing penulis selama perkuliahan mulai dari semester1 hingga sekarang.

8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

9. Kepala Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Wali Nagari dan perangkat Nagari Di Nagari Taeh Bukik, beserta masyarakat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta semangat.

10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 06 Juni 2021

Penulis,

VILIA LAMDESTA
NIM. 11720724863



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematikan Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI NAGARI TAEH BUKIK	13
A. Sejarah Nagari Taeh Bukik	13
B. VISI dan MISI Nagari Taeh Bukik	15
C. Kondisi Geografis	20
D. Kondisi Demografis	21
E. Administrasi Nagari	21
F. Data Perangkat Nagari.....	22
G. Data BAMUS Nagari	23
H. Data Monografi Desa/Nagari	24
I. Data Keuangan	26
J. Data Kelembagaan	28
K. Trantib dan Bencana.....	29



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Pemerintahan daerah	30
B. Tinjauan Umum Tentang Nagari.....	32
C. Tinjauan Umum Pemerintahan Nagari.....	39
D. Tinjauan Umum Badan Musyawarah Nagari (BAMUS).....	41
E. Tinjauan Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)	42
BAB IV PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PEMERINTAH NAGARI DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.....	46
A. Pelaksanaan Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pemerintah Nagari di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	45
B. Kendala Dalam Melaksanakan Pengawasan yang di Hadapi oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel	8
Tabel 2.1 Data Perangkat Nagari	22
Tabel 2.2 Data BAMUS Nagari.....	23



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan, Nagari Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Nagari. Maka dari itu keberadaan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) memegang posisi strategis, karena keberadaannya dalam Pemerintah Nagari adalah bukti perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan Nagari dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Bentuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 88 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari di atas, disebutkan dalam pasal 103 yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. BAMUS Nagari melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui.
 - a. Perencanaan kegiatan pemerintahan nagari;
 - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan nagari
3. Bentuk pengawasan BAMUS Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, ditemukan belum optimalnya pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), hal ini terlihat dari Kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) tidak mengetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan setiap program kerja dari Pemerintah Nagari, sehingga akan berdampak pada kesulitan dalam mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, belum optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Nagari dan Perangkat Nagari pada saat melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukan adanya pengawasan yang optimal dari Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) untuk dapat mengamati dan mengawasi serta memperhatikan kinerja dari Pemerintah Nagari. Adapun penulisan dan penelitian tersebut diberi judul **PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH**

NAGARI (BAMUS) DALAM PEMERINTAH NAGARI DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup ini terhadap Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Pemerintah Nagari Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 serta kendala-kendala dalam melaksanakan Pengawasan oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan terfokus. Menurut Muhammad Hatta “Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukan, kita tidak puas hanya melihat saja melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam lagi”.¹

Sedangkan menurut Winarso Surakhmat mengatakan “Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti di lalui dengan jalan

¹ Muhammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : Mutiara, 2004), hal.

semestinya apabila akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan”.²

Berdasarkan pendapat diatas dan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Pemerintah Nagari Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018?
2. Apa Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Pemerintah Nagari Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat

² Winarso Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 2005), hal. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengetahui Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Pemerintah Nagari Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018.
- 2) Untuk mengetahui Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan Pemerintahan Nagari setempat dalam pengembangan tugas-tugas dimasa yang akan datang.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan Pemerintahan Nagari lainnya sebagai bahan pertimbangan. Serta mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

c. Manfaat Akademis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 2) Mengembangkan dan mendalami pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada konsentrasi Hukum Tata Negara.
- 3) Untuk pedoman atau bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Pemerintah Nagari .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.³ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

Jenis dan Sifat penelitian Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dengan responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan penelitian.⁴ Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.⁵

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti memilih

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1982), hal. 51.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian di lokasi ini karena penulis tertarik untuk mengkaji dan memberikan gambaran tentang Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Pemerintah Nagari Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018.

Dan juga peneliti membutuhkan data yang akurat karna adanya masalah mengenai Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Pemerintah Nagari di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak dijalankan secara baik.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁶

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua BAMUS satu orang, Wali Nagari satu orang, dan Tokoh Masyarakat 10 orang.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 122.

Adapun populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala BAMUS	1	1	100%
2	Wali Nagari	1	1	100%
3	Tokoh Masyarakat/Masyarakat	50	10	20%
Jumlah		52	12	23%

Sumber : Data dari hasil wawancara Langsung dengan Ibu Nenglis , Ketua BAMUS Taeh Bukik.

3. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dikumpulkan atau dilacak dari bahan-bahan penting yang berkaitan dengan judul diantaranya :

- 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- 4) Peraturan Derah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Pemerintahan Nagari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini buku yang digunakan sebagai pembanding atau penguatnya yang memberi penjelasan mengenai hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Sedangkan bahan hukum tersier atau bahan penunjang berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.⁷

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk

⁷ M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ru Media, 2012), hal. 165.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian.⁸

c. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, penelitian ini menggunakan teknik *library research* karna ada data yang digunakan dalam penelitian berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku, kitab-kitab, dan sumber-sumber tulisan lainnya.⁹

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari instrument penelitian, kemudian disusun dan diatur di kelompokan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil di kumpulkan, di teliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya, dengan pokok masalah lalu ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah penulis menggunakan Metode Deduktif. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara umum ke khusus.¹⁰

⁸ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabet, 2014), hal. 127.

⁹ Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat SAB*, (Bayumas: CV Mangku bumi Media, 2020), hal. 23.

¹⁰ *Ibid.*,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematikan Penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika yang terdiri dari lima bab atau bagian, yaitu sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang memuat pasal-pasal seperti Sejarah Nagari Taeh Bukik, Visi dan Misi Nagari Taeh Bukik, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Administrasi Nagari, Data Perangkat Nagari, Data BAMUS Nagari, Data Monografi Nagari, Data Keuangan, dan Data Kelembagaan yang ada di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang digunakan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini tentang Pemerintahan Daerah, Tinjauan Umum tentang Nagari, Tinjauan Umum Pemerintahan Nagari, Terbentuknya Kembali Ke Pemerintahan Nagari, Tinjauan Umum Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan dan Konsep



BAB IV

Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian-penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Fungsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Pengawasan Pemerintah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari dan Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. Serta saran – saran yang diharapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama di bidang Hukum Tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI NAGARI TAEH BUKIK

A. Sejarah Nagari Taeh Bukik

Taeh adalah nama kayu-batang Taeh. Pada atahun 1913 sampai 1918 Nagari Taeh dipimpin oleh Kapalo Nagari yang bernama Salim Dt. Mongguang. Karena perkembangan penduduk yang Luasnya Wilayah, maka pada tahun 1918 Taeh terbagi dua (2) :

1. Taeh Bukik
2. Taeh Baruah

Pada atahun itu lahirlah pemimpin pertama untuk Taeh Bukik (Kapalo Nagari) yaitunya Dt. Paduko Tuan. Berhubung Dt. Paduko Tuan seorang pendidik (Guru) pertama di Tgaeh Bukik, maka Pemerintah Nagari diserahkan kepada Dt. Tunaro (Dt. Palo Gaek) pada tahun 1919. Dt. Tunaro memimpin Nagari Taeh Bukik sangat lama sekali yaitu dari tahun 1919-1938 oleh sebab itu beliau dijuluki Dt. Palo Gaek. Karena Dt. Tunaro yang sidah semakin tua, maka pada tahun 1938 maka pemimpinan Nagari Taeh Bukik diserahkan beliau ke anaknya sendiri yaitu Lengah Dt. Sarumpun.

Nagari Taeh Bukik yang berada pada ketinggian ± 700 M dari permukaan laut betul-betul pada saat itu sulit untuk jangkauan karena tak ada jalan, apalagi alat transportasi berhubung pada saat itu kita sedang dijajah Belanda.

Pada tahun 1940 terjadi lagi pergantian pimpinan Nagari taeh bukik yaitu tu dipimpin oleh mahudun DT patiah. Dalam kepemimpinan mahudun DT patiah negara kita yang semula dijajah oleh Belanda akhirnya digantikan oleh Jepang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahudun DT patiah memimpin sampai kita memproklamasikan kemerdekaan RI tahun 1945 dan setelah itu Taeh Bukik dipimpin oleh Buyuang Dt. naro sati dari tahun 1945 sampai 1950.

Pertukaran kepemimpinan terjadi lagi pada tahun 1950 dari Buyuang Dt. naro sati kepada H. Nuru. Sampai 1955. Pada tahun 1955 terjadi lagi pertukaran pemimpin Buki yaitu dari H. Nuru kepada Lengah Dt. Sarumpun (yang kedua) dari tahun 1955 sampai 1959, pada saat kepemimpinan lengah DT sarumpun (1955-1959) ada Wali perang yaitu Buyuang Agus (lebih dikenal dengan panggilan BA) dan walinya H. Muri.

Pada masa pergolakan PRRI, di bukit pada tahun 1960 ada BOK/ POS tentara. Pada tahun 1960 dipimpin oleh Condong sampai 1962. Pada tahun 1962 pimpinan taeh bukik diserahkan pada Amir Syamsu (1962-1980), Amir Syamsu adalah Wali Nagari terlama memimpin Nagari Taeh Bukik, bersamaan lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa. Pada tahun 1980 barulah Negeri Taeh Bukik berubah menjadi Desa.

Pada saat itu nama taeh bukik berubah menjadi taeh bukik dan terpecah menjadi empat desa (Jorong dulu menjadi desa) yaitu:

1. Desa Pogang dengan Kepala Desa sa Ajusri HN
2. Desa Talago dengan Kepala Desa Suarli Dt. Bandaro Kayo
3. Desa Bukit Tapuang dengan Kepala Desa Bahari M
4. Desa Pabatungan dengan Kepala Desa Hasmi.

Kurang lebih 9 tahun taeh Bukit terdiri dari 4 desa. Maka berdasarkan SK Gubernur Sumbar nomor 140-155 Tahun 1979 tentang penataan desa. Taeh Bukik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berubah menjadi 1 Desa yaitu Desa Taeh Bukit dengan kepala desa Ajusri HN (Tahun 1990-1998).

Pada tahun 1998 ini diadakan pemilihan kepala desa baru melalui pemilihan langsung maka terpilihlah Amriara. S menjadi kepala desa taeh bukit (1998-2001). Dan pada tahun 2021 maka Desa Taeh Bukit berubah nama menjadi Nagari Taeh bukit dan yang menjadi Wali Nagari adalah Amriara. S yang ditunjuk melalui kesepakatan BPAN (ganti nama dari kepala desa menjadi Wali Nagari).

Wali Nagari Amriara. S memimpin Nagari taegukgi dari tahun 2001-2008, dan pada tahun 2008 berdasarkan Perda Kabupaten 50 Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari maka diadakan pemilihan langsung dan Yonwihadi Dt. Sindo terpilih sebagai Wali Nagari taeh bukit periode 2008-2014.

Berhubung Yonwihadi Dt. Sindo mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD maka beliau mengundurkan diri dan diadakan pemilihan langsung dan terpilihlah Hardimus Dt. Pangulu Bosa sebagai Wali Nagari periode 2014-2019. Setelah habis masa jabatan Wali Nagari maka pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan bentri Wirman sebagai Pj.Wali Nagari Taeh Bukik.¹¹

B. VISI dan MISI Nagari Taeh Bukik

1. VISI

Visi adalah suatu pandangan ke depan yang harus dicapai dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu wilayah yang akan menjadi komitmen bersama semua pihak termasuk semua masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 6 (enam) taun depan,

¹¹ Profil Nagari Taeh Bukik 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari taeh bukik menetapkan visi “Mewujudkan Nagari yang tangguh, kompak, terbuka dan berwawasan lingkungan berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.

Pada sisi naga retail bukit terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu kompak, terbuka dan berwawasan lingkungan berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Tangguh adalah nagari yang mampu mandiri secara ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok.

Kompak adalah bersatu nya seluruh elemen/ lapisan masyarakat mulai dari tingkat anak-anak hingga orang dewasa tanpa memandang faktor sosial ekonomi antara si miskin si kaya untuk bisa saling bahu nambah u dalam membangun nagari taeh bukik di masa yang akan datang dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi demi terciptanya negeri yang kompak antara masyarakat dengan masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah nagari, dan yang paling penting adalah untuk bisa menghilangkan sifat syirik, iri, dengki di tengah-tengah masyarakat serta juga bisa menghilangkan ego-ego jorong yang berlebihan.

Terbuka adalah pemerintah nagari yang senantiasa selalu welcome kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan baik secara struktural maupun secara fungsional dan juga terbuka bagi pihak ketiga untuk datang dan memberi masukan serta mencoba berinvestasi di kenegaraan ini, karena menurut hemat kami pemerintahan nagari tidak akan bisa terlepas dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tiga unsur, yakni : Wali Nagari, Masyarakat, dan investor atau pengusaha.

Berwawasan lingkungan adalah pemerintah walaupun masyarakat bisa bersinergi dalam menata pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya, sehingga tumbuh kembang nagari bisa dikontrol oleh masyarakat melalui BAMUS.

Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan etika dan moral masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, dan norma adat (Syarak mangato adat mamakai).¹²

2. MISI

Yang merupakan misi dari kenagarian Taeh Bukik yaitu:¹³

- a. Mewujudkan pengelolaan nagari dengan prinsip transparan, bersih dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.
- b. Meningkatkan sumber daya masuk manusia yang cerdas sehat beriman berkualitas tinggi serta menumbuhkan jiwa entrepreneur (wirausaha) khususnya bagi generasi muda.
- c. Meningkatkan kesejahteraan petani dengan memacu produktifitas dan pemasaran hasil hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perlindungan terhadap hak pendidikan dan kesehatan masyarakat khususnya perempuan dan anak.
- e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta

¹² RPJM Nagari Taeh Bukik Tahun 2016-2021.

¹³ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan sarana komunikasi dan telekomunikasi.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Nagari, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan nagari 6 tahun ke depan sebagai berikut:

Misi pertama adalah: mewujudkan pengelolaan Nagari dengan prinsip transparan, bersih dan memberi pelayanan prima Kepada seluruh masyarakat.

Yang bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya negeri yang di idam idam kan masyarakat yaitu negara yang bisa diawasi dan dibangun secara bersama-sama.
- b. Terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat yang biasa dikenal dengan sebutan 3S (Senyum, sapa, salam) profesional dan efektif serta tepat waktu dalam pelayanannya.

Misi kedua adalah Meningkatkan sumber daya masuk manusia yang cerdas sehat beriman berkualitas tinggi serta menumbuhkan jiwa entrepreneur (wirausaha) khususnya bagi generasi muda.

Yang bertujuan untuk :

- a. Mengasah dan mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih maju dengan memberikan semacam motivasi serta pelatihan-pelatihan guna menumbuhkan semangat baru atau spirit baru untuk bisa bersaing secara nasional maupun internasional tanpa mengenyampingkan adat istiadat dan norma-norma yang ada di kenagarian taeh bukik khususnya.
- b. Membantu mencari solusi terhadap individu individu supaya tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan dengan lapangan kerja, sehingga masyarakat Nagari khususnya generasi muda nagari taeh bukik mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara berwirausaha.

Misi ketiga adalah Meningkatkan kesejahteraan petani dengan memacu produktifitas dan pemasaran hasil hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Yang bertujuan untuk :

- a. Tercapainya keinginan masyarakat nagari yang merupakan lumbung padi terbesar di kabupaten lima puluh kota karena mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai petani.
- b. Mengelola hasil-hasil pertanian dengan BUM Nagari sehingga para petani tidak lagi merasa dirugikan oleh tengkulak.

Misi keempat adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perlindungan terhadap hak pendidikan dan kesehatan masyarakat khususnya perempuan dan anak.

Yang bertujuan untuk :

- a. Tercapainya kesetaraan gender di Nagari yang selama ini masih terkontaminasi antara laki-laki dan perempuan.
- b. Terwujudnya negeri yang mempunyai regenerasi ke depan dengan memberi beasiswa penuh terhadap anak Nagari yang berprestasi tanpa membedakan status sosial keluarganya.

Misi kelima adalah Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang

berkelanjutan serta meningkatkan sarana komunikasi dan telekomunikasi.

Yang bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya kelancaran ekonomi bagi masyarakat yang mobilitasnya tidak terganggu dengan keadaan infrastruktur/ jalan yang rusak, baik jalan usaha tani maupun jalan raya, sehingga aktifitas masyarakat bisa berjalan dengan lancar.
- b. Terwujudnya ruang terbuka hijau, sehingga Nagari ramah anak bisa tercapai.¹⁴

C. Kondisi Geografis

1. Letak Nagari

Nagari Taeh Bukik adalah salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Jarak tempuh wilayah Nagari Taeh Bukik dari Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota 12 km. Nagari ini memiliki luas wilayah 2.691 Ha, dengan potensi lahan yang produktif.¹⁵

Adapun batas-batas Nagari sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Nagari Simpang Kapuak dan Sungai Antuan
Kecamatan Mungka |
| Sebelah Selatan | : Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau |
| Sebelah Barat | : Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh |
| Sebelah Timur | : Nagari Solok Bio-bio Kecamatan Harau ¹⁶ |

2. Topografi Nagari

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid.,

- a. Persawahan
- b. Perladangan
- c. Perkebunan
- d. Peternakan
- e. Perbukitan¹⁷

D. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Nagari Taeh Bukik memiliki jumlah penduduk **999 KK** (**1.646** org laki-laki dan **1.703** org perempuan) sehingga jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak **3.349** jiwa.¹⁸

2. Sumber Mata Pencaharian Pokok

Sumber mata pencaharian masyarakat di Nagari Taeh Bukik yang utama adalah Petani/Pekebun yang hampir 90%. dan lainnya sekitar 10% meliputi: Tukang, Buruh Bangunan dan Dagang, PNS, TNI/Polri, swasta, pensiunan, dan beberapa wargamerantau keluar daerah untuk mencari nafkah. Masyarakat taeh Bukik banyak yg merantau ke Batam Kepulauan Riau.¹⁹

E. Administrasi Nagari

Pusat pemerintahan Nagari Taeh Bukik terletak di Jorong Bukit Tapuang dan untuk menuju Kantor Nagari dari pusat kecamatan berjarak 7 Km, dari pusat Pemerintahan kota berjarak 15 Km, dari pusat Pemerintahan Kabupaten berjarak 12 Km dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.²⁰

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Ibid.,

Secara administratif Nagari Taeh Bukik terbagi atas 4 Dusun/Jorong yaitu:

1. Jorong Pogang
2. Jorong Talago
3. Jorong Bukit Tapuang
4. Jorong Pabatungan

Setiap Jorong dipimpin oleh seorang Kepala Jorong sebagai pembantu Wali Nagari. Wali Nagari pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat Nagari melalui BAMUS, dan prosedur pertanggung jawaban di sampaikan ke Bupati melalui Camat, kemudian dari pada itu Wali Nagari bersama dengan BAMUS setiap tahun wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakatnya.

F. Data Perangkat Nagari

Tabel 2.1 Data Perangkat Nagari

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Bentriwirmam	Pj. Wali Nagari	SLTA
2	Bentriwirman	Sekretaris Nagari	SLTA
3	Sintawati	Kasi Pemerintahan	S1
4	Safriwarto	Kasi Kesejahteraan	D3
5	Dia Ayu Lestari	Kasi Pelayanan	S1
6	Syahwalisep	Kaur TU dan Umum	SLTA
7	Febrini Mulia	Kaur Keuangan	SLTA
8	Rahman Eka	Kaur Perencanaan	S1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Saputra		
9	Rori Amiko	Kepala Jorong Pogang	SLTA
10	Asrajul Fuadi	Kepala Jorong Talago	SLTA
11	Wardiman	Kepala Jorong Bukit Tapuang	SLTA
12	Ismarlis	Kepala Jorong Pabatungan	SLTA

Sumber data: Profil Nagari Taeh Bukik 2020

G. Data BAMUS Nagari

Tabel 2.2 Data BAMUS Nagari

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Nenglis	Ketua BAMUS	SLTA
2	Jon Wihadi Dt. Sindo	Wakil Ketua BAMUS	SLTA
3	M. Fauzi Nandra	Sekretaris BAMUS	S1
4	Juwartono	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	SLTP
5	Syahrial Inardi	Anggota	SLTA
6	Yardatis	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Pembangunan	SLTA
7	Darlisman	Anggota	SLTP

Sumber data: Profil Nagari Taeh Bukik 2020

H. Data Monografi Desa/Nagari

1. Desa/Nagari : Taeh Bukik
2. Kecamatan : Payakumbuh
3. Kabupaten : Lima Puluh Kota
4. Provinsi : Sumatera Barat
5. Kependudukan
 - a. Jumlah Penduduk : 3.349 Jiwa
 - b. Jumlah Kepala Keluarga : 999 KK
 - c. Kepadatan Penduduk:
 - 1) Laki-laki : 1,518 Orang
 - 2) Perempuan : 1,407 Orang
 - d. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan
 - 1) Lulusan Pendidikan Umum
 - a) Taman Kanak-Kanak : -
 - b) Sekolah Dasar : 623 orang
 - c) SMP : 427 orang
 - d) SMA : 433 orang
 - e) Akademi/D1-D3 : 35 orang
 - f) Sarjana : 109 orang
 - g) Pascasarjana : 4 orang
 - 2) Lulusan Pendidikan Khusus
 - a) Pondok Pesantren : 5 orang
 - b) Pendidikan keagamaan : 9 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tidak lulus dan tidak sekolah

- a) Tidak lulus : 9 orang
- b) Tidak bersekolah : 5 orang

e. Mata Pencanharian Penduduk

1) Karyawan

- a) PNS : 46 orang
- b) TNI/Polri : 5 orang

2) Wiraswasta/pedagang : 307 orang

3) Petani : 715 orang

4) Pensiunan : 12 orang

5) Pekerja Seni : 1 orang

6) Lainnya : 816 orang

f. Jumlah penduduk miskin : 1.256 Jiwa, 314 KK (menurut standar BPS)

g. UMR kabupaten : Rp. 2.100.000,-

h. Sarana prasarana

1) Kantor Nagari : Permanen

2) Prasarana Kesehatan :

a) Pustu : 1 buah

b) Poskesri : 3 buah

c) UBKM : 6 buah

3) Prasarana pendidikan

a) Pustaka Nagari : belum ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Gedung PAUD	: 4 buah
c) Gedung TK	: 2 buah
d) Gedung SD	: 4 buah
e) Gedung SMP	: 1 buah
f) Gedung SMA	: belum ada
g) Gedung perguruan tinggi	: -
4) Prasarana ibadah	
a) Masjid	: 4 buah
b) Mushola	: 12 buah
5) Prasarana Umum	
a) Olahraga	: 6 buah
b) Kesenian/budaya	: 5 buah
c) Balai pertemuan	: 1 buah
d) Sumur nagari	: -
e) Pasar nagari	: -
f) Lainnya	: Embung 3 unit ²¹

I. Data Keuangan

1. Pendapatan Asli Nagari	: Rp. 5.600.000,-
a. Pungutan/retribusi	: Rp. 0,-
b. Hasil Kekayaan Nagari	: Rp. 300.000,-
c. Hasil Usaha Nagari	: Rp. 0,-
d. Omset BUMNag Tahunan	: Rp. 0,-

²¹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Pendapatan lainnya : Rp. 199.288,-
2. Besaran ADD yang dikelola per tahun : Rp. 939.256.169,-
3. Bantuan yang diterima nagari :
 - a. Pemerintah : -
 - b. Provinsi : -
 - c. Kabupaten : Rp. 29.403.000,-
4. Belanja Nagari : Rp. 2. 156.544.071,-
5. SILPA/SIKPA : Rp. 180.933.614,-
6. Dana cadangan : -
7. Penghasilan dan Tunjangan :
 - a. PJ. Wali Nagari
 - 1) Penghasilan tetap : Rp. 0,-
 - 2) Sumber : ADD
 - 3) Tunjangan : Rp. 30.600.000,-
 - 4) Sumber : ADD
 - b. Sekretaris Nagari
 - 1) Penghasilan tetap : -
 - 2) Sumber : -
 - 3) Tunjangan : -
 - 4) Sumber : ADD
 - c. Perangkat Nagari
 - 1) Penghasilan tetap : Rp. 243.000.000,-
 - 2) Sumber : ADD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Data Kelembagaan

1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

- a. Jumlah pengurus : 5 orang
- b. Jumlah anggota : 12 orang
- c. Jumlah kegiatan perbulan : 1 kegiatan
- d. Jumlah dana yang dikelola : -

2. Lembaga Adat : 1 Lembaga

3. TP PKK

- a. Jumlah pengurus : 9 orang
- b. Jumlah anggota : 25 orang
- c. Jumlah kegiatan perbulan : 1 Kegiatan
- d. Jumlah buku administrasi yang dikelola : 7 buah

e. Jumlah dana yang dikelola : Rp. 4.905.000,-

4. BUMNag

- a. Jumlah BUMNag : 1 buah
- b. Jenis BUMNag : Wisata
- c. Jumlah modal dasar : Rp. 50.000.000,-

²² *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jumlah keuangan yang dikelola : Rp. 52.420.000,-
5. Karang Taruna
 - a. Jenis kegiatan : 1 Kegiatan
 - b. Jumlah pengurus : 5 orang
 - c. Jumlah anggota : 42 orang
6. Jorong
 - a. Jumlah jorong : 4 buah
 - b. Jumlah bantuan yang diterima : Rp. 1.468.750,-
7. Lembaga kemasyarakatan lainnya : 5 lembaga²³

K. Trantib dan Bencana

1. Jumlah anggota linmas : 17 orang
2. Jumlah pos kamling : 4 buah
3. Jumlah pos hutan lindung : 1 buah²⁴

²³ *Ibid.,*

²⁴ *Ibid.,*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten dari provinsi Sumatera Barat yang terbentuk pada tahun 19 Desember 1949. Kota ini diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau menjalankan pemerintahan sebagai daerah yang berdaerah yang diresmikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai daerah otonom tentu saja pemerintah Kabupaten Lima Puluh

²⁵ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota harus bisa meningkatkan sistem pemerintahannya agar bisa terus maju dan dapat bersaing dengan daerah lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sistem pemerintahan Nagari, yang mana sebuah sistem pemerintahan yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) berdasarkan asal usul nagari diwilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Nagari

1. Pengertian Nagari

Kata Nagari” berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “Nagari”, yang dibawa oleh bangsa Hindu yang tinggal di tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat pada zaman Hindu. Bangsa Hindu itu pulalah yang menciptakan pembagian Nagari, serta menentukan masyarakat Minangkabau bersuku-suku dahulunya. Nagari-Nagari kecil itu merupakan bentuk negara yang berpemerintahan sendiri.²⁷

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam Pasal 1 angka 2, menjelaskan pengertian Nagari sebagai berikut:

Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur

²⁶ Prima Afdhal, “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2, 2014, hal. 2.

²⁷ LKAAM, *Pelajaran Adat Minangkabau Sejarah dan Budaya*, (Sumatera Barat: Tropic Offset Printing, 1987), hal. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dalam Pasal 1 angka 3, menjelaskan pengertian Nagari sebagai berikut:

”Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya”. Sementara wilayah Nagari meliputi kesatuan wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun”.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 Tentang Nagari pasal 1 angka 8 juga dijelaskan tentang Nagari yang di samping sama dengan PERDA Provinsi di atas yang lebih menekankan kepada batas-batas Nagari sebagai berikut :

”Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lain lagi dengan A. A Navis yang lebih menekankan Nagari kepada suatu lokasi atau keadaan masyarakat yang di diami oleh sekelompok orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekurang-kurangnya empat suku sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

Nagari adalah sebagai suatu permukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk (Penghulu Tua) selaku pimpinan pemerintah tertinggi.²⁸

Selanjutnya Musyair Zainuddin menekankan Nagari dari bentuk Nagari secara modern, sebagaimana yang dijelaskan berikut. Nagari merupakan satuan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Artinya, Nagari merupakan suatu bentuk pemerintahan berdasarkan adat Minangkabau dengan struktur dan susunan yang asli yakni adat Minangkabau, disamping melaksanakan pemerintahan secara umum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Nagari merupakan federasi genealogis yang mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas alam yang jelas. Genealogis adalah perkumpulan berdasarkan sistem kekerabatan. Pada hakikatnya, Nagari adalah "republik otonom" yang dengan sesamanya membentuk federasi longgar. Federasi longgar dari federasi republik Nagari dinamakan "luhak". Di Sumatera Barat, terdapat 3 luhak yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Koto yang ketiganya merupakan federasi longgar, dari ketiga luhak tersebut yang dinamakan Alam Minangkabau.³⁰

²⁸ A. A Navis, Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 92.

²⁹ Musyair Zainuddin, *Serba-Serbi Adat Minangkabau*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hal. 4.

³⁰ Mansoer, dkk, *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhratara, 1970), hal. 15-16.

Nagari merupakan daerah lingkungan konfederasi kultural Minangkabau dan berhak mengurus diri sendiri. Dari sisi dapat dilihat bahwa lembaga Nagari juga berfungsi sebagai lembaga adat dan pemerintah, keduanya saling kait-berkait, jalin-menjalin dan merupakan kesatuan integral. Nagari dalam sistem pemerintahannya mempunyai unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun ia juga merupakan kesatuan (*holistik*) bagi perangkat tatanan sosial budaya lainnya.³¹

Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai minimal empat suku, dan memiliki wilayah tersendiri dengan batas-batas tertentu beserta kekayaan yang ada di dalamnya berdasarkan susunan asli adat Minangkabau.

2. Proses Terbentuknya Nagari

Suatu Nagari terdiri dari satu kesatuan wilayah satu kesatuan masyarakat dan kesatuan adat. Selain itu juga memiliki sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itulah Nagari harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai Nagari.³²

Di dalam undang-undang Minang (Tambo) menyebutkan proses terbentuknya Nagari sebagai berikut:

Dt. Kampung Dalam mengemukakan empat tingkat pertumbuhan

³¹ Sjahmurni, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 3.

³² Yasril Yunus, "Aktor Kultural Dalam Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat (Posisi Niniak Mamak Dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal)", *Jurnal Humanus* Vol. 12 No. 1, 2013, hal. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju sebuah Nagari sebagai berikut:

a. Taratak

Taratak adalah perumahan (*perhumaan*) tempat penduduk Nagari bersawah dan berladang bersama- sama. Oleh karena tempat *berhuma* itu jauh dari Nagari asal mereka maka didirikan tempat tinggal sementara. Biasanya berbentuk satu ruangan. Kehidupan sosial mereka belum terlepas dan masih terkait sepenuhnya dengan keluarga di Nagari asal.

b. Dusun

Dusun merupakan permukiman sebagai perluasan dari taratak, yang dahulunya sebagai tempat tinggal sementara dan selanjutnya mulai menetap. Oleh karena perkembangan keluarga maka di dirikan rumah kediaman yang belum berbentuk rumah gadang. Susunan kekeluargaan atau kekerabatan belum berbentuk geneologis yang terpisah dengan suku yang ada di Nagari asal.

c. Koto

Semacam perluasan dari dusun dan keluarga yang tinggal dalam koto ini sudah berkembang sehingga terjadi "*pacah paruik*" dengan suku asal. Dengan demikian sudah terjadi kelompok genealogis yaitu kelompok bertali darah atau suku dengan penghulu sendiri. Rumah gadang dan mesjid sudah berdiri akan tetapi baru untuk tempat berapat dan bermusyawarah sebagai syarat bagi sebuah Nagari belum ada. Namun demikian sebagian besar kegiatan tidak lagi bergantung kepada Nagari asal.

d. Nagari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari adalah perluasan dari koto dengan susunan masyarakat yang lebih sempurna. Kelompok kekerabatan genealogis atau suku adalah lebih dari tiga maka sudah memerlukan balairung adat tempat berapat. Segala sarana kebutuhan sosial Nagari tidak lagi bergantung kepada Nagari asal maka disepakatilah membentuk pemerintahan sendiri dengan wilayah serta kekayaan sendiri.³³

3. Syarat Terbentuknya Nagari

Adapun persyaratan untuk bisa disebut Nagari ditetapkan dalam apa yang disebut dalam adat Minangkabau dengan Undang-Undang Pembentukan Nagari. Pemakaian kata-kata undang-undang di sini adalah menurut pengertian adat Minang, bukan istilah pengertian ilmu Tata Negara. Undang-Undang Pembentukan Nagari menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu permukiman dapat disebut Nagari. Tujuan yang ingin dicapai dengan Undang-Undang Pembentukan Nagari ialah supaya ada keseragaman pengertian Nagari di ketiga Luhak di Minangkabau.³⁴

4. Terbentuknya kembali ke Pemerintahan Nagari

Pada masa sistem pemerintahan Nagari sebelum 1983, kehidupan sosial dan politik di Nagari didominasi oleh pimpinan informal yang disebut Ninik Mamak, alim ulama dan Cerdik Pandai. Ketiga unsur masyarakat yang lazim disebut tigo tungku sajarangan menjadi komponen masyarakat yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan di Nagari, meskipun mereka tidak

³³ Dt. Kampung Dalam, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, (Sumatera Barat: Kristal Multimedia, 2012), hal. 3-4.

³⁴ Amir MS., *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997), hal. 43-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

duduk dalam organisasi formal di kanagarian.. Memasuki rezim orde baru, setelah keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa terjadi penyamarataan sistem pemerintahan terendah menjadi sistem pemerintahan desa. Selama pemerintahan desa diakui besarnya bantuan yang diperuntukkan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana desa, tapi kerugian terbesar masyarakat minangkabau adalah hilangnya peranan adat dalam mengatur kehidupan masyarakat, Sehingga tingkah laku sebagian masyarakat tidak lagi mendapat intervensi moral dari nilai-nilai yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau. Masyarakat bebas mengikuti dan menikmati dinamika kehidupan global yang kadangkala menjerumuskan generasi muda ke arah yang tidak baik. Berikut tabel perbandingan situasi sosial politik sistem pemerintahan desa dan sistem pemerintahan Nagari, diikuti perbandingan sistem pemerintahan Nagari sebelum 1979 dengan sistem pemerintahan Nagari sesudah tahun 2000.

Pada akhirnya, pengakuan kembali nagari sebagai pemerintahan terendah melalui otonomi daerah, justru menempatkan nagari pada kondisi yang dilematis. Nagari menerima intervensi pemerintah yang menempatkan nagari sebagai bagian dari birokrasi negara. Di sisi lain proses ini mengurangi otonomi nagari karena membuat nagari secara substansial berbentuk desa, dan mengurangi ciri utama dari pemerintahan nagari format lama, atau tradisi masyarakat Minang yaitu “kepemimpinan kolektif”. Selain itu keinginan pemerintah untuk mensinergikan kelembagaan lokal dengan organisasi modern, di lapangan justru menimbulkan berbagai berpotensi konflik. Jika hal ini tidak

dikelola dengan baik, maka akan menjadi hambatan dalam mewujudkan nagari yang otonom karena konflik dapat melemahkan pemerintahan nagari (negatif fungsional).³⁵

C. Tinjauan Umum Pemerintahan Nagari

1. Pengertian Pemerintahan Nagari

Secara historis pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut di bantu oleh para manti (orang cerdas yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan).³⁶

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 1 angka (3).

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 angka (8).

“Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera

³⁵ Susi Fitria Dewi, “Konflik dalam Pemerintahan Nagari”, Jurnal Demokrasi Vol. V No. 1, 2006, hal. 67-68.

³⁶ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, (Sumatera Barat: Tropic Offset Printing, 1987), hal. 20.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2. Perangkat Nagari

a. Wali Nagari

Sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah nagari, Wali Nagari mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

b. Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari, merupakan pemimpin sekretariat nagari yang berkedudukan sebagai staf yang membantu wali nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan membawahi para kepala urusan. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan yang berkaitan dengan Sekretaris Nagari.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan, adalah staf yang membantu sekretaris nagari dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan nagari. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan yang berkaitan dengan Kepala Urusan.

d. Kepala Jorong

Wali Jorong, berkedudukan sebagai pelaksan yang membantu walinagari dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya. Wali jorong dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada walinagari melalui sekretaris nagari. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan mengenai Kepala Jorong.

D. Tinjauan Umum Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)

1. Pengertian Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)

BAMUS berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Anggota BAMUS merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokrasi melalui musyawarah. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (11), menjelaskan pengertian dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari:

“Badan Musyawarah Nagari selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan peraturan diatas, BAMUS merupakan lembaga perwakilan rakyat Nagari yang merupakan mitra kerja dari Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

2. Fungsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)

Fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BAMUS) dalam menjalankan tugasnya. Fungsi BAMUS dalam melaksanakan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari pasal 88.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wewenang Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)

Wewenang dari BAMUS dalam menjalankan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari pasal 118.

4. Hak Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)

BAMUS mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Hak dari BAMUS terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari pasal 108.

5. Kewajiban Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)

Dalam melaksanakan wewenangnya, BAMUS berkewajiban sebagaimana di sebutkan dalam pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintah nagari haruslah mengacu pada aturan pemerintahan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu BAMUS sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan nagari di harapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah di tetapkan.

E. Tinjauan Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut George R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan kebaikan-kebaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Sedangkan menurut Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pemerintahan, pengawasan pemerintahan adalah pengawasan dari dan terhadap pemerintah, mengapa pemerintah yang berkuasa mesti dan harus diawasi. Dikarenakan hal tersebut pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat dengan baik dan benar. Fungsi mengatur diserahkan kepada eksekutif yang selanjutnya diawasi legislatif, sedangkan fungsi mengatur diserahkan kepada legislatif yang diawasi oleh rakyat melalui kontrol pers, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai grup penekan yang memilih mereka.

Adapun tujuan dari pengawasan birokrasi pemerintahan bukan untuk mencari kesalahan seorang pejabat melainkan mendeteksi dan mengecek apakah kegiatan yang sedang ataupun akan dilakukan telah berjalan sesuai rencana dan apakah mencapai hasil sebagaimana rencana, atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang di gariskan, berbagai kebijaksanaan diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum atau tidak melanggar moral yang berlaku.³⁷

³⁷ Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 130-132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sama halnya dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai lembaga legislatif, yaitu Badan Musyawarah Rakyat Nagari (BAMUS) nama lain dari Badan Pemusyawaratan Desa di Pemerintahan Desa (BAMUS). Memiliki fungsi sebagai pengawas pemerintahan di tingkat terendah, yaitu Nagari. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa/Nagari, Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa/ Nagari. Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar.

Dalam pelaksanaan pengawasan ini, BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa/Wali Nagari serta meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa/Nagari. Bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa/Nagari dengan cara BAMUS mengawasi semua tindakan pemerintahan Desa/Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan terhadap APBDesa/APBNag dengan cara BAMUS memantau semua pemasukan dan pengeluaran Desa/Nagari, meminta laporan pertanggung jawaban yang menyangkut keuangan Desa/Nagari.³⁸

³⁸ Afriyanni, dkk, "Pengelolaan Dana Nagari Di Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Pembangunan Nagari Vol. 5 No. 1, 2020, hal. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Perintah Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, tidak ada peraturan Nagari di Nagari Taeh Bukik kecuali Peraturan Mengenai APB Nagari dan RPJM Nagari. Minimnya kebijakan-kebijakan yang ada di Nagari Taeh Bukik menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari dan BAMUS masih lemah dalam hal menghasilkan Peraturan Nagari dan dalam pengawasan langsung BAMUS seringkali tidak melaksanakan tugas nya untuk mengawasi secara langsung apa yang dibuat pemerintah Nagari sedangkan dengan adanya pengawasan langsung dalam hal ini BAMUS harus turun langsung kelapangan atau tempat kegiatan yang dibuat pemerintah maka dari situ BAMUS mengetahui apa kegiatan yang dibuat sudah sesuai atau belum. Yang mengawasi kegiatan di Nagari ini adalah BAMUS mempunyai tugas untuk mengawasi apa saja yang menjadi kinerja dari Wali Nagari selaku pemerintah Nagari dalam hal Kegiatan yang telah direncanakan maupun dilaksanakan untuk mengetahui lebih lagi tentang Kegiatan yang telah diberikan dan juga untuk masyarakat BAMUS juga mempunyai peran penting untuk mengsejahterakan masyarakat Nagari tetapi dalam mencapai kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat belum terpenuhi karena ada beberapa yang menghambat keberhasilan tersebut yang pertama, BAMUS tidak menjalankan tugas dengan baik, tanggungjawab yang telah diberikan tidak dijalankan secara optimal, kedua tidak ada kerja sama antara pemerintah Nagari dengan BAMUS karena yang kita ketahui BAMUS dengan pemerintah Nagari mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra kerja dinagari dan yang ketiga BAMUS hanya mementingkan kepentingan pribadi sedangkan kepentingan umum atau masyarakat seringkali disampingkan tapi yang kita ketahui tugas utama BAMUS yaitu kesejahteraan dari masyarakat karena BAMUS sebagai parlemenya masyarakat sehingga BAMUS sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai Kegiatan yang baik harus ada pengawasan dari BAMUS sebagai parlemenya masyarakat tetapi BAMUS saat ini belum menjalankan tugas dengan baik.

2. Kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Taeh Bukik adalah sebagai berikut:
 - a. Masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BAMUS Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
 - c. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Ketua BAMUS dengan anggotanya, dimana hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing.



B. Saran

Dari Kesimpulan Diatas, Dapat Penulis Berikan Saran Dan Masukan Dalam Fungsi Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintah Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini terlihat bahwa BAMUS nagari Taeh Bukik belum menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, diharapkan BAMUS lebih bertanggungjawab pada jabatannya, sehingga fungsi kelembagaan nagari dapat dijalankan dengan efektif dan proses penyelenggraan pemerintahan berjalan dengan baik, serta dapat memperbaiki citra BAMUS selama ini, yang hanya sebagai lembaga pelengkap pemerintahan nagari. Agar ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh BAMUS, supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Seperti meningkatkan koordiansi dengan pemerintah nagari.
2. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari anggota BAMUS diharapkan kepada Pemerintahan Nagari maupun Pemerintahan Kabupaten mengadakan pelatihan-pelatihan bagi anggota BAMUS supaya menambah pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi Pemerintahan Nagari diharapkan agar selalu melakukan koordinasi dengan BAMUS dalam melakukan setiap kegiatan dilakukan oleh Pemerintahan Nagari. Dan Untuk pihak Kabupaten agar lebih memperhatikan dana alokasi untuk Bamus, karena dana yang sekarang ini dirasakan amat kurang untuk melaksanakan berbagai kegiatan Bamus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Almanshur, M. D. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ru Media.
- Amir, M. (1997). *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Asikin, A. d. (2010). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Audrey, K. (2005). *Dari Pemberontak ke Integrasi: Sumatera barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia.
- Azan, Muhammad. (2016). Skripsi: “Peran badan permusyawaratan nagari (BAMUS) dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari di nagari canduang koto laweh kabupaten agam privinsi sumatera barat”. Padang: Universitas Andalas.
- Dt. Kampung Dalam. (2012). *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*. Sumatera Barat: Kristal Multimedia.
- Edison Piliang, dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. (2013). *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Sumatera Barat: Multimedia.
- Eko, S. (2005). *Menggantung Asap Kritik dan Refleksi Atas Gerakan Kembali ke Nagari*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eko, S. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Hatta, M. (2004). *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Mutiara.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kemal, I. (2008). *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya*. Padang: Graha Ilmu.
- Kencana, Inu. (2016). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). (1987). *Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*. Sumatera Barat: Tropic Offset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Printing.

M. Situmorang, V. d. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Mansoer, dkk. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.

Muchsan. (1992). *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.

Navis, A. A. (1984) *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.

Philips, S. d. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabet.

Siswanto, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sjahmurni. (2006). *Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press.

Soekanto, S. (1982). *Pengantar Hukum*. Jakarta: UII Press.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarsa, Sasa. (2020). *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat SAB*. Bayumas: CV Mangku bumi Media.

Sunggono, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sungut, E. P. (2013). *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Sumatera Barat: Multimedia.

Surakhmat, W. (2005). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Widjaja. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin, M. (2016). *Serba-Serbi Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Zuriati, E. (1972). *Buku Urusan Otonomi Daerah*. Sumatera Barat.

B. Jurnal

Afriyanni, dkk. (2020). "Pengelolaan Dana Nagari Di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Pembangunan Nagari* Vol. 5 No. 1.

Prima, A. (2014). *Sistem Pemerintahan Nagari, (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*. *Jurnal Ilmu pemerintahan, Jom FISIP* Volume 1



Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 2.

Harisnawati, dkk. (2018) .*“Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah”*, Jurnal Bakaba Vol. 7 No. 2.

Yunus ,Yasril. (2013). *“Aktor Kultural Dalam Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat (Posisi Niniak Mamak Dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal)”*, Jurnal Humanus Vol. 12 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ketua Bamus



Wawancara dengan Wali Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PEMERINTAH NAGARI DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018"* yang ditulis oleh :

Nama : **VILIA LAMDESTA**
 NIM : 11720724863
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Firdaus, SH., M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, SH., M.H

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II
Lysa Angrayni, SH., M.H

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VILIA LAMDESTA
 NIM : 11720724863
 Tempat/Tanggal Lahir : Taeh Bukik / 09 Juli 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PEMERINTAH NAGARI DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

VILIA LAMDESTA
NIM: 11720724863



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax., 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS)
DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN

UMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH, ditulis oleh saudara :
KABUPATEN UMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2010

Nama : VILIA LAMPESTA
NIM : 11720724863
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : RABU / 24 MARET 2021
Narasumber : Dr. Muhammad Darwis, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

Jalilus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

M. Darwis
NIP. 19780227 200801 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 April 2021

Un.04/F.I/PP.00.9/3282/2021
Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: VILIA LAMDESTA
NIM	: 11720724863
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40680
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3282/2021 Tanggal 5 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

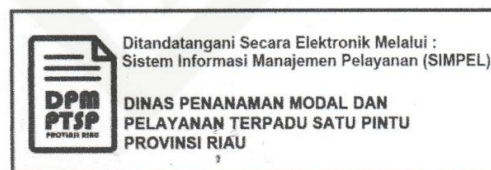
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | VILIA LAMDESTA |
| 2. NIM / KTP | : | 11720724863 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 April 2021

Un.04/F.1/PP.01.1/3320/2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Asril, SHI, MH

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : VILIA LAMDESTA

NIM : 11720724863

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Hal yang bersangkutan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



**BADAN PERMUSYARAWATAN (BAMUS)
NAGARI TAEH BUKIK
KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

REKOMENDASI
No: 01/B/Bamus-TBK/VI/2021

**TENTANG
IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un04/F-I/PP.00.9/5282/202 tanggal 05 April 2021 tentang Mohon Izin Riset, dengan ini Bamus Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan Rekomendasi izin Pelaksanaan Riset/Penelitian Kepada :

Nama : VILIA LANDESTA

NIM : 11720724863

Alamat : Jorong Bukik Tapuang Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota

Judul Penelitian : **FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018**

Lokasi : Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan ketentuan sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan Data di maksud
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada BAMUS Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Rekomendasi ini akan ditarik kembali.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

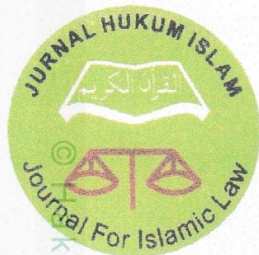


Taeh Bukik, 12 April 2021
BAMUS Nagari Taeh Bukik

Ketua

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : VILIA LAMDESTA

NIM : 11720724863

JURUSAN : ILMU HUKUM

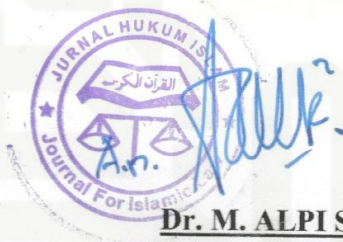
JUDUL : PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PEMERINTAH NAGARI DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018

Pembimbing: Asril, SH. MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



VILIA LAMDESTA, lahir di Taeh bukik, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 09 Juli 1999, merupakan anak Pertama dari 2 (Dua) bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Rusli

M.Z. dan Ibu Pepi Awismar. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 02 Taeh Bukik pada tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Kecamatan Payakumbuh selama 3 tahun dari tahun 2011-2014 dan SMAN selama 3 tahun dari Tahun 2015-2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur Ujian Mandiri. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini penulis aktif berorganisasi di BEM Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. Penulis telah melakukan magang di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II A pada Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota pada Agustus 2020. Penulis melakukan penelitian dengan judul *"Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pemerintah Nagari di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018"* di bawah bimbingan Bapak ASRIL, SH.,MH. berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 27 Juli 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,45 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat Sangat Memuaskan.